

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Model Jaringan Organisasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Model jaringan organisasi yang bermodel roda yang selama ini digunakan oleh para SKPD sesuai dengan perwali No. 551.05/869/Kep/IX/2012 tentang Pembentukan kembali forum lalulintas dan angkutan jalantingkat Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai *Leading sector* dianggap belum maksimal dikarenakan hasil rapat didalam forum tersebut, seharusnya yang mengikuti pertemuan tersebut para pengambil keputusan. Akan tetapi, kenyataannya berbanding terbalik dikarenakan orang-orang dari masing-masing perwakilan lembaga baik Dishub dan Kepolisian hanya kepala saja atau para anggotamasing-masing instansi sehingga keputusan rapat kadang tidak terdistribusikan

ketingkat paling bawah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi agar kinerja para SKPD termasuk pihak kepolisian dapat menjadi lebih baik dalam rangka penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.

2. Pengawasan Sistem Koordinasi (*control coordination system*) yang dilakukan oleh pimpinan atau *top leader* ditingkat pemerintah pusat dan ditingkat pemerintah daerah seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mendorong program-program pemerintah dapat tercapai secara maksimal seperti pelayanan transportasi yang lebih efektif, nyaman dan aman.
3. Komitmen pemerintah kota untuk mendorong terciptanya pelayanan transportasi yang berstandar dunia sesuai dengan apa yang menjadi Visi-Misi Pemerintah Kota Makassar Menjadi Kota Dunia untuk Semua. Adapun bentuk komitmennya adalah mendorong satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih masif dalam melakukan penanggulangan kemacetan lalu lintas dan menjalin kerjasama dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Makassar agar masalah tersebut dapat terselesaikan karena persoalan tersebut adalah tanggung jawab bersama serta penegakan aturan lalu lintas yang lebih ketat agar para pengguna jalan dapat berlalu lintas secara tertib dan bebas dari kemacetan.

4. Komunikasi dan kerjasama antar instansi khususnya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Kota Makassar harus berjalan lebih efektif (Koordinasi Horizontal) serta ditingkatkan instansi masing-masing hasil dari pertemuan di forum tersebut harus terdistribusikan ke tingkat paling bawah atau pelaksana di lapangan, hal apa saja yang menjadikan keputusan atau solusi dalam rangka penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar (koordinasi vertikal).

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang peneliti uraikan di atas, maka perlumerekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar lebih meningkatkan komitmen dalam mengawal dan mengevaluasi kinerja SKPD khususnya Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam melaksanakan program-program pelayanan transportasi yang berdampak pada kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.
- (2) Pihak kepolisian dalam Hal ini Satuan Lalu Lintas agar lebih meningkatkan penindakan aturan dalam menanggulangi kemacetan lalu lintas terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di Kota Makassar.

- (3) Dinas Perhubungan Kota Makassar agar lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Kinerja Pegawai agar penanggulangan kemacetan dapat dilakukan dengan maksimal.
- (4) Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam berkendara serta mematuhi segala aturan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Makassar perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan (*continue*) terkait peraturan, perda, undang-undang lalu lintas dan kedisiplinan berlalu lintas di tingkat sekolah yang ada di Kota Makassar dan masyarakat pada umumnya (para pengguna jalan raya) agar kesadaran tertib berlalu lintas dapat tercapai.

